

**ANALISIS TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA
PERKARA NO: 10/KPPU-L/2009 MENGENAI PENETAPAN KOMISI
DAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999**

Ajeng Chita Sekarsari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: chitasekarsari@yahoo.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/KPPU-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi Dan Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pilihan tema ini dilatar belakangi karena melihat kenyataan mengenai praktik persaingan tidak sehat masih sering terjadi dalam proses persaingan usaha.

Tujuan penelitian ini: (1) Menganalisis apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perkara no: 10/KPPU-L/2009. (2) Menganalisis apakah penetapan komisi yang dilakukan terlapor termasuk perjanjian yang dilarang pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999. Penelitian hukum ini menggunakan *statute approach* dan *case approach*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah, terlapor I yaitu ASATIN tidak terbukti melanggar pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga karena ASATIN hanya merupakan wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya sehingga tidak ada orientasi pada bisnis. Sedangkan pada anggota ASATIN yaitu terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII merupakan para agen tiket yang melakukan perjanjian dalam hal pemberian besaran komisi kepada sub agen dan telah memenuhi unsur pelaku usaha dan pesaingnya sehingga dapat dikualifikasikan telah melakukan persaingan usaha tidak sehat. Penetapan komisi tidak termasuk perjanjian yang dilarang pada Pasal 5 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, karena penetapan komisi berbeda dengan penetapan harga. Harga terbentuk terlebih dahulu baru diambil komisi sebagai upah dari orang yang telah berjasa menjualkan barang atau jasanya. Sehingga komisi tidak mempengaruhi harga.

Kata kunci: *Analisis persaingan usaha tidak sehat, penetapan komisi dan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999*

ABSTRACT

The journal discusses about the analysis of unhealthy business competition at the case no: 10/KPPU-L/2009 about the determination of commission and agreement that are prohibited in the Act No. 5 year 1999. The theme selection was based on the fact about the unhealthy competition in the business.

The research aimed at (1) Analyzing whether there is unhealthy competition in the case no: 10/KPPU-L/2009. (2) Analyzing whether the determination of commission done by the reported including the prohibited agreement at the article 5 clause (1) Act No. 5 year 1999. The legal research used statute approach and case approach. The research used normative juridical approach. The legal materials including primary, secondary, and tertiary materials.

The results were, the reported I: ASATIN was not proven violate the article 5 clause (1) Act No. 5 year 1999 about the determination of price because ASATIN only a communication forum for members so no business orientation. While at the members of ASATIN, the reported II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII are ticketing agents that make agreement in giving the commission to the sub agents and has fulfill the element of business doers and the competitor so can be disqualified has do unhealthy business competition. The commission determination is not included in the prohibited agreement in article 5 Act no. 5 year 1999, because at the commission determination different with the price determination. The price is formed first then the commission is taken as the wage of the deserving person that sell the goods or services. So the commission is not influence the price.

Keywords: *Analysis of unhealthy business, the determination of commission and agreement that are prohibited in Act no. 5 year 1999.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi negara yang berkembang. Untuk memajukan masyarakatnya pemerintah melakukan perkembangan dalam bidang ekonomi dan keuangannya, karena itu di negara Indonesia perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat menjanjikan. Dimana selain masyarakat pendukung dari proses perdagangan juga relatif banyak, perdagangan sendiri merupakan mata pencaharian yang dapat menjanjikan kemakmuran tingkat tinggi oleh para pelaku usahanya.

Di samping itu sejak Negara Indonesia ini mengalami krisis moneter yang berpuncak pada tahun 1998 membuat masyarakat Indonesia mencari alternatif lain untuk menjaga kestabilan finansialnya. Salah satunya adalah dengan membangun bisnis pribadi berbasis usaha kecil dan menengah.

Adanya kegiatan perdagangan dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya saat ini seiring dengan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari sementara tingkat pendapatan pekerja yang relatif tetap tentu saja menyebabkan melakukan proses perdagangan lebih menjanjikan dari pada menjadi pegawai atau pekerja. Disamping faktor lain seperti fleksibilitas waktu, jaminan pekerjaan sepanjang masa, dapat membuat masyarakat mandiri, dan yang terpenting dapat membuat bangga karena hasil keuntungan adalah hasil jerih payah sendiri. Akan tetapi dalam melakukan proses perdagangan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak masalah-masalah yang timbul dalam proses perdagangan itu sendiri.

Mengingat kata pepatah dimana ada gula pasti ada semut sehingga dalam merebutkan gula tersebut sesama semut pasti melakukan kompetisi agar mendapatkan gula yang banyak dibandingkan yang lain. Dalam hal ini yang dimaksud dalam perdangangan ada banyak persaingan dalam mendapatkan keuntungan yang banyak bagi masing-masing individu. Persaingan dalam hal mencari keuntungan dagang memang sudah biasa ditemukan sehari-hari. Hanya saja yang menjadi masalah dalam sebuah persaingan ada yang disebut persaingan sehat maupun persaingan yang tidak sehat. Disini jelas yang menjadi masalah adalah persaingan yang tidak sehat dimana dalam persaingan ini terjadi banyak

penyimpangan dimana penyimpangan tersebut menyebabkan salah satu pihak pasti ada yang dirugikan.

Macam-macam bentuk dari kecurangan dalam melakukan usaha dagang sebagai contoh monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkokolan, perjanjian yang dilarang dan lain-lain. Hal itu terbukti dari salah satu informasi dari media elektronik yang melakukan wawancara dan mendapatkan informasi sebagai berikut “Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, praktik persaingan tidak sehat masih berlangsung. Hal tersebut menjadi tantangan bagi KPPU.”¹

Persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan suatu pihak rugi dan dapat merusak kelancaran dari majunya perekonomian lokal maupun dunia. Oleh karena itu sebelum terlambat dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat maka kita harus mencegah itu terjadi.

Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada aturan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.² Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.³

Banyak aspek yang sebenarnya terjadi dalam persaingan dagang tetapi agar lebih khususnya dalam tulisan ini akan membahas tentang sebuah putusan dari KPPU yang menangani kasus persaingan usaha yaitu tentang kasus dari *Asosiasi Agen Ticketing* (ASATIN).

Meninjau dari putusan KPPU dengan perkara nomor : 10/KPPU-L/2009⁴ Dari kasus yang akan diteliti awalnya disini terjadi sebuah penyimpangan atau kecurangan dalam proses melakukan tindak usaha. Ada sebuah laporan pada KPPU dimana pelapor melaporkan adanya tindak kecurangan usaha yang dilakukan oleh *Asosiasi Agen Ticketing* yang selanjutnya disebut (ASATIN) dan anggota ASATIN.

¹ economy.okezone.com , *Persaingan Usaha Tidak Sehat Masih Terjadi*, diakses pada tanggal 9 juni 2013

² Devi meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), hal. 5.

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1)

⁴ <http://www.kppu.go.id>

Dari laporan yang diterima oleh KPPU memiliki fakta-fakta pemeriksaan yaitu pertama pada terlapor I, ASATIN; Terlapor II, PT Alam Multi Nasional; Terlapor III, PT A&T Holidays; Terlapor IV, PT Bidy Tour; Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa; Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa; Terlapor VII, PT Jasa Wisata; Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata; Terlapor IX, PT Luana Jaya; Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi; Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri; Terlapor XII, CV Global Entrepreneur.

Seluruh terlapor yang dituliskan di atas adalah *relevant market* dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket atau agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat. Pihak ASATIN diduga melakukan kartel sehingga para terlapor di atas diduga melakukan tindakan persaingan curang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam melakukan proses usaha atau perdagangan.

Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Apabila terbukti bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan dalam persaingan usaha yaitu melakukan kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka sanksi yang akan didapatkan bisa berupa tindakan administratif.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perkara nomor : 10/KPPU-L/2009 ?
2. Apakah penetapan komisi yang dilakukan terlapor termasuk perjanjian yang dilarang pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perkara nomor : 10/KPPU-L/2009.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah penetapan komisi yang dilakukan terlapor termasuk perjanjian yang dilarang pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain.

E. Pembahasan

1. Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/KPPU/2009

Seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan mengenai identitas para terlapor, bahwa pasar bersangkutan (*relevant market*) dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket/agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat.

Pada struktur pasarnya terdapat 39 pelaku usaha penjual tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies* (ASITA), yang dimana 11 dari 39 pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha jasa penjualan tiket pesawat adalah anggota ASATIN.

ASATIN didirikan pada tahun 2004 oleh para agen penjual tiket pesawat yang berdomisili di Mataram. Anggota ASATIN adalah PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusantara, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT Luana Jaya, PT Satiavi cabang Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan PT Global Entrepreneur yang juga merupakan anggota ASITA Mataram. Pada awalnya

ASATIN memiliki 13 anggota tetapi saat ini hanya ada 11 anggota dan yang aktif sekarang hanya 8 anggota.

Para agen tiket pesawat anggota ASATIN menjalankan usaha dengan menjual tiket pesawat kepada konsumen akhir maupun kepada pelaku usaha perorangan atau badan usaha/hukum yang membeli tiket bukan untuk kepentingannya melainkan untuk pihak ketiga (atau disebut sub agen).

Anggota ASATIN pada umumnya adalah agen dari maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Lion Air/Wings Air, Batavia Air, Indonesia Air Transport atau Trigana Air. Dimana tidak ada syarat untuk menjadi anggota ASATIN dan ASATIN tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan maskapai penerbangan Mataram.

Berdirinya ASATIN disebabkan karena ketidakpuasan para agen penjual tiket serta tidak berfungsinya ASITA dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam permasalahan penjualan tiket yang ada.

ASATIN juga digunakan sebagai wadah oleh para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman dan informasi serta mencari solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Adapun informasi dan permasalahan yang di bahas dalam ASATIN diantaranya:

- a. Penentuan besaran komisi yang diberikan agen kepada sub agen atau pihak lain yang disetarakan dengan sub agen;
- b. Keberadaan sub agen yang suka menunda pembayaran atau berhutang;
- c. Staf-staf agen tiket pesawat yang memiliki kinerja buruk dan suka berpindah-pindah tempat kerja;
- d. Dan memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui bentuk pelatihan.

Tentang kesepakatan besaran komisi, bahwa para Terlapor mendapatkan sejumlah komisi dari maskapai penerbangan untuk setiap tiket pesawat yang berhasil dijual.

Besaran komisi yang diterima oleh agen penjualan tiket pesawat diperhitungkan dari *basic fare* bukan dari harga jual akhir. Terlapor memberikan komisi dengan besaran tertentu kepada sub agen atas transaksi penjualan tiket yang dilakukan sub agen.

Dari fakta-fakta yang telah diperoleh Tim Pemeriksa selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari Agen kepada Sub Agen.⁵ Hal ini tidak sesuai karena pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai penetapan harga.

Apa yang telah disebutkan dalam fakta-fakta pada posisi kasus dan putusan kasus diatas menyatakan bahwa adanya point yang menyatakan ASATIN diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari Agen kepada Sub Agen adalah tidak benar. Karena Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur kartel sebagaimana dipersangkakan dalam kasus.

Bahwa pendirian ASATIN semata-mata untuk kegiatan sosial sehingga tidak ada orientasi pada bisnis. Maksud dari kegiatan sosial ini ialah ASATIN hanya sebagai wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya sehingga ASATIN tidak dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sedangkan pada anggota ASATIN yaitu terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII merupakan para agen tiket yang melakukan perjanjian dalam hal pemberian besaran komisi kepada sub agen, karena telah memenuhi unsur pelaku usaha dan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dalam pasar bersangkutan, maka dapat dikategorikan melakukan perjanjian yang dilarang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Tindakan anti persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Putusan

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan lanjutan, tanggapan atau pembelaan para terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat tentang para terlapor yang dimana Terlapor I

⁵ Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009, Hal.17.

atau *Asosiasi Agen Ticketing* atau disingkat ASATIN adalah tempat perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat. Majelis Komisi telah menemukan fakta bahwa ASATIN tidak melakukan suatu kegiatan usaha melainkan hanya merupakan suatu wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya.

Sehingga dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor I, *Asosiasi Agen Ticketing* atau disingkat ASATIN bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999.

Sedangkan Tim Pemeriksa Lanjutan dalam laporan pemeriksaan lanjutan menyatakan terjadinya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran Komisi dari agen kepada sub agen.

Terlapor tidak membantah adanya kesepakatan-kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal penentuan besaran komisi dari agen kepada sub agen, namun yang dipermasalahkan adalah adanya kekaburan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Lanjutan dalam mengkualifikasi pelanggaran hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tim Pelaksana Lanjutan mengatakan pihak ASATIN dan anggota ASATIN telah terbukti melakukan pelanggaran kartel. Kekaburan ini jelas terlihat pada dasar hukum yang tidak relevan, bahwa kartel tidak diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seperti yang jelas tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai masalah penetapan harga.

Walaupun terlapor tidak membantah adanya kesepakatan-kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal penentuan besaran komisi dari agen kepada sub agen, tetapi para terlapor juga memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasikan sebagai penetapan harga atas barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999, yang dimana para terlapor memberikan tanggapan dengan maksud berusaha meyakinkan pihak Majelis Komisi atas tindakan anti persaingan usaha tidak sehat.

Menimbang sebelum Majelis Komisi memutuskan, bahwa salah satu Anggota Komisi yaitu Dr. Sukarmi, S.H., M.H. tidak sepakat dengan pendapat maupun penilaian majelis komisi lainnya. Sehingga yang terjadi dalam perkara ini adalah bukan merupakan kesepakatan harga tetapi adalah kesepakatan komisi. Sementara dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009 adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang kesepakatan harga sementara yang terjadi faktanya adalah kesepakatan besaran komisi yang dilakukan antara Agen dengan Sub Agen.

Konstruksi hukumnya jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan sub agen adalah perjanjian keagenan walaupun tidak terjadi perjanjian secara tertulis dan yang terjadi adalah adanya kesepakatan berupa “*gentlement agreement*” namun dalam prakteknya para sub agen menjalankan fungsinya sebagai perantara/makelar untuk menjualkan tiket dengan mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar 2-3% yang diambilkan dari *basic fare*, hal tersebut tidak mempengaruhi harga penjualan tiket ke konsumen.

Harga terbentuk terlebih dahulu baru diambil komisi sebagai upah dari orang yang telah berjasa menjualkan tiketnya. Harga sebagaimana diuraikan pada putusan Nomor: 10/KPPU-L/2009 yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu. Sedangkan pengertian harga dalam kamus hukum ekonomi adalah nilai sesuatu yang diutarakan dalam bentuk sejumlah uang untuk memperoleh suatu barang.⁶

Sedangkan komisi merupakan imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur mengenai penetapan komisi karena pemberian komisi tidak dapat dikualifikasikan dalam perbuatan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemberian komisi pada perkara no: 10/KPPU-L/2009 ini dimaksudkan sebagai upah lelah atas jasa yang

⁶ AF. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta, Proyek ELIPS, 1996)

telah diberikan atau untuk untuk meningkatkan kinerja semata. Sehingga tidak mempengaruhi harga sama sekali.

Setelah proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan untuk membuktikan kebenaran gugatan ternyata ASATIN dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hal ini dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ASATIN hanya merupakan wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya sehingga tidak ada orientasi pada bisnis. Sehingga ASATIN bukan termasuk dalam pelaku persaingan usaha yang memiliki pesaing dalam usaha, karena kegiatannya yang memang hanya sebagai wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya saja sehingga unsur pelaku usahanya tidak terpenuhi, dan Majelis Komisi memutuskan bahwa ASATIN tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada ASATIN untuk tidak mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sedangkan para terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII menurut pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan merupakan pelaku usaha di bidang agen penjualan tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang bersaing satu sama lain pada pasar bersangkutan, dan telah melakukan kesepakatan dalam pemberian besaran komisi kepada sub agen dan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dikarenakan unsur pelaku usaha dan pesaingnya terpenuhi.

Walaupun adanya perbedaan pendapat antara Anggota Majelis Komisi dalam sebuah putusan suatu perkara, mengenai pendapat dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. yang menyatakan tidak sepakat dengan pendapat atau penilaian Majelis Komisi lainnya, bahwa harga tidak sama dengan komisi. Maka putusan akan diambil melalui suara terbanyak dari Anggota Majelis Komisi.

Sehingga Majelis Komisi memutuskan anggota ASATIN yaitu terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

F. Penutup

F.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV tentang analisis putusan KPPU nomor: 10/KPPU-L/2009 mengenai perjanjian penetapan harga sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa menurut fakta dan kejadian yang terjadi dinyatakan bahwa ASATIN diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari Agen kepada Sub Agen adalah tidak benar. Karena Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur kartel sebagaimana dipersangkakan dalam kasus. Akan tetapi setelah dilakukan analisa kasus menurut undang-undang yang sudah ditetapkan menyatakan bahwa ASATIN hanya merupakan wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya sehingga tidak ada orientasi pada bisnis maka, ASATIN tidak dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga. Akan tetapi anggota ASATIN yaitu Terlapor II, PT Alam Multi Nasional; Terlapor III PT A&T Holidays; Terlapor IV, PT Bidy Tour; Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa; Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa; Terlapor VII, PT Jasa Wisata; Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata; Terlapor IX, PT Luana Jaya; Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi; Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri; dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat karena unsur pelaku usaha dan pesaingnya terpenuhi.
2. Dalam mengkualifikasi pelanggaran hukum pada perkara no: 10KPPU-L/2009 adalah faktanya ASATIN tidak melakukan perjanjian penetapan harga dan juga tidak terbukti melakukan kartel. ASATIN hanya menetapkan kesepakatan besaran komisi, dan pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasikan sebagai penetapan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/ pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak diatur mengenai adanya penetapan komisi tetapi diatur mengenai penetapan harga. Penetapan harga sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa karena dapat menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum.

F.2 Saran

1. Pada kasus ini bahwa para Terlapor diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari Agen kepada Sub Agen adalah tidak benar. Karena Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur kartel sebagaimana dipersangkakan dalam kasus. Faktanya ASATIN hanya merupakan wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya sehingga tidak ada orientasi pada bisnis maka, ASATIN tidak dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan Tim Pemeriksa Lanjutan Beserta Majelis Komisi menyimpulkan bahwa anggota ASATIN terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai kartel komisi, yang sebenarnya pokok dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 ialah penetapan harga. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Komisi yang satu dengan yang lain mengenai penetapan komisi berbeda dengan penetapan harga, maka seharusnya Tim pemeriksa Lanjutan serta Majelis Komisi menggunakan dasar hukum yang lebih relevan dalam mengkualifikasi kasus.
2. Seharusnya pihak Tim Pemeriksa Lanjutan lebih jeli lagi dalam menangani kasus-kasus sehingga tidak mengalami kesalahan yang sama dalam mengkualifikasi kasus pada kasus-kasus selanjutnya.

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara no: 10KPPU-L/2009 seharusnya gugatan dimasukkan dalam berkas putusan perkara sebelum duduk perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Meyliana, Devi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Setara Press: Malang

AF. Elly Erawaty dan J.S. 1996. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*. Proyek ELIPS: Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

C. Dokumen

Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009

D. Internet

Rezy, Fakhry. *Persaingan Usaha Tidak Sehat Masih Terjadi*.
<http://economy.okezone.com/read/2013/06/09/320/819247/kppu-persaingan-usaha-tidak-sehat-masih-terjadi>. diakses tanggal 09 Juni 2013

<http://www.kppu.go.id>